

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang telah dihadapi Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam MDGs. Untuk melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan secara efektif, diperlukan ketersediaan data yang valid dan *up to date*. Terdapat dua instansi pemerintah yang mengumpulkan data tentang kemiskinan, yaitu BPS dan BKKBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang pemerintah dalam mengukur kemiskinan serta mengidentifikasi program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan. Melalui analisis dokumen dan eksplorasi data, serta penggalian informasi ke beberapa narasumber diketahui bahwa visi pemerintah terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh tujuan dan kepentingan masing-masing lembaga. Dalam pelaksanaan program, misalnya pendistribusian Raskin di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ketepatan sasaran dan validitas data penerima bantuan masih menjadi kendala. Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan data yang ada. Dengan demikian, diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga untuk menghasilkan data yang berkualitas, sehingga tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai.

**Kata kunci:** kemiskinan, pengukuran kemiskinan, data